

KOMUNITAS DAN ADVOKASI DALAM PENGEMBANGAN SEKOLAH INKLUSIF

Fitriana Ananda, Gina Sindi, Marshanda Yulia, Rizkia Ummami, Wulanda Aditya Azis

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received, 20 July 2026,

Revised, 26 July 2026,

Accepted, 31 July 2026

Keywords:

*Inclusive education,
community, advocacy, inclusive
school, students*

ABSTRAK

Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan belajar yang sama kepada seluruh peserta didik tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, maupun latar belakang lainnya. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga memerlukan keterlibatan komunitas dan advokasi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran komunitas dan advokasi dalam pengembangan sekolah inklusif melalui kajian pustaka. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan berbagai referensi berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan inklusif. Hasil kajian menunjukkan bahwa komunitas memiliki peran penting dalam membangun kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, meningkatkan kesadaran terhadap keberagaman, serta mengurangi stigma terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Sementara itu, advokasi berperan dalam memperjuangkan hak-hak peserta didik agar memperoleh layanan pendidikan yang adil dan setara melalui advokasi individu, kelompok, maupun kebijakan. Berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi hambatan dalam implementasi pendidikan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan sekolah inklusif yang berkualitas.



Copyright © 2026 Universitas Sebelas April.
All rights reserved.

Corresponding Author:

Wulanda Aditya Azis,
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas April,
Jl Angkrek Situ No 9.
Email: wulandaadityaazis15@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan (Arriani dkk, 2022). Pendidikan inklusif memberikan kesempatan belajar yang sama kepada seluruh peserta didik tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, maupun latar belakang lainnya.

Penerapan pendidikan inklusif bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang menghargai keberagaman dan menjamin terpenuhinya hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dalam pelaksanaannya, sekolah inklusif tidak hanya berfokus pada penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi juga pada penyediaan layanan

pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan inklusif memerlukan dukungan dari berbagai pihak agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal.

Komunitas memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan sekolah inklusif melalui kerja sama antara sekolah, keluarga, masyarakat, organisasi sosial, dan pemerintah. Keterlibatan berbagai pihak tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, meningkatkan kepedulian terhadap keberagaman, serta mengurangi stigma terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, advokasi menjadi salah satu upaya untuk memperjuangkan hak peserta didik agar memperoleh layanan pendidikan yang adil, setara, dan sesuai dengan kebutuhannya. Sinergi antara komunitas dan advokasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang berkelanjutan.

Meskipun berbagai kebijakan mengenai pendidikan inklusif telah diterapkan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sekolah inklusif tidak hanya bergantung pada kesiapan sekolah, tetapi juga memerlukan dukungan aktif dari seluruh unsur masyarakat. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan mengkaji peran komunitas dan advokasi dalam pengembangan sekolah inklusif, termasuk bentuk, tujuan, tantangan, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui metode studi literatur.

1.1. Pengertian Komunitas dalam Pendidikan Inklusif

Komunitas dalam pendidikan inklusif merupakan sekumpulan individu, kelompok, dan lembaga yang bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang menghargai keberagaman serta memberikan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh peserta didik (Kemendikbudristek, 2022). Komunitas ini tidak hanya mencakup warga sekolah, tetapi juga keluarga, masyarakat, organisasi sosial, pemerintah, dan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi semua anak.

1.2 Tujuan Komunitas dalam Pendidikan Inklusif

Komunitas dalam pendidikan inklusif bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang mampu menerima dan menghargai keberagaman peserta didik tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, budaya, maupun latar belakang lainnya. Keberadaan komunitas menjadi sarana untuk membangun kesadaran bersama bahwa setiap anak memiliki hak yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Melalui keterlibatan guru, orang tua, masyarakat, organisasi sosial, dan pemerintah, komunitas dapat memperkuat budaya inklusif di sekolah sehingga peserta didik merasa diterima, dihargai, dan memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Menurut Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek (2022), komunitas berperan sebagai mitra sekolah dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif melalui kolaborasi, partisipasi aktif, serta penguatan dukungan terhadap pemenuhan hak belajar seluruh peserta didik.

Selain itu, komunitas juga bertujuan meningkatkan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi peserta didik selama proses pembelajaran. Kolaborasi tersebut memungkinkan setiap pihak saling berbagi informasi, memberikan pendampingan, serta mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, khususnya anak berkebutuhan khusus. Keberadaan komunitas juga berfungsi sebagai media edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap peserta didik berkebutuhan khusus sehingga tercipta lingkungan sosial yang lebih inklusif. Menurut Kustawan (2023), keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat dipengaruhi oleh keterlibatan seluruh unsur masyarakat karena pendidikan inklusif bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi merupakan

tanggung jawab bersama dalam menjamin terpenuhinya hak pendidikan setiap anak.

1.2. Bentuk-Bentuk Komunitas Pendukung Pendidikan Inklusif

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif terdapat berbagai bentuk komunitas yang memiliki peran masing-masing. Komunitas orang tua, misalnya, berfungsi sebagai wadah berbagi pengalaman mengenai cara mendampingi anak berkebutuhan khusus di rumah maupun di sekolah. Organisasi penyandang disabilitas berperan dalam memberikan edukasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas sekaligus menjadi mitra sekolah dalam penyusunan program inklusif. Selain itu, terdapat komunitas guru yang saling berbagi strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan komunitas relawan pendidikan juga sering memberikan pelatihan, pendampingan, maupun bantuan fasilitas yang mendukung terselenggaranya pendidikan inklusif secara optimal.

1.3. Peran Komunitas dalam Pengembangan Sekolah Inklusif

Komunitas memiliki peran yang sangat besar dalam membantu sekolah mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif. Salah satu perannya adalah membangun kerja sama antara sekolah dengan orang tua sehingga perkembangan peserta didik dapat dipantau secara berkelanjutan. Komunitas juga berperan memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami pentingnya menghargai keberagaman. Selain itu, komunitas dapat membantu sekolah menyediakan sumber daya, baik berupa tenaga pendamping, pelatihan guru, maupun bantuan sarana pembelajaran. Dengan keterlibatan komunitas, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi lingkungan yang mampu menerima setiap peserta didik tanpa membedakan latar belakang ataupun kondisi mereka.

1.4. Pengertian Advokasi dalam Pendidikan Inklusif

Advokasi dalam pendidikan inklusif merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak peserta didik agar memperoleh layanan pendidikan yang adil, setara, dan sesuai dengan kebutuhannya (Ainscow, 2005). Advokasi dilakukan ketika masih terdapat peserta didik yang mengalami diskriminasi, kesulitan memperoleh akses pendidikan, atau belum mendapatkan layanan yang sesuai. Melalui advokasi, berbagai pihak berusaha memastikan bahwa kebijakan maupun praktik pendidikan di sekolah benar-benar mendukung prinsip inklusivitas. Dengan demikian, setiap peserta didik. Pentingnya *advokasi public relations* dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusif dan strategi advokasi yang efektif, seperti kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah (Rahmi & Wjayanti, 2025).

1.5. Tujuan Advokasi dalam Pendidikan Inklusif

Advokasi bertujuan memastikan bahwa hak setiap peserta didik dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain menjamin akses pendidikan yang setara, advokasi juga bertujuan menghilangkan berbagai hambatan yang dapat mengurangi kesempatan belajar peserta didik berkebutuhan khusus. Advokasi mendorong terciptanya kebijakan sekolah yang lebih ramah terhadap keberagaman, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, serta memperkuat perlindungan terhadap peserta didik dari segala bentuk diskriminasi maupun perlakuan yang tidak adil.

1.6. Bentuk-Bentuk Advokasi

Advokasi dalam pendidikan inklusif dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Advokasi individu dilakukan untuk membantu satu peserta didik yang mengalami permasalahan tertentu, misalnya kesulitan memperoleh layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Advokasi kelompok dilakukan ketika terdapat beberapa peserta didik yang memiliki permasalahan serupa sehingga memerlukan solusi secara bersama-sama. Sementara itu, advokasi kebijakan dilakukan untuk mendorong perubahan atau penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan pendidikan inklusif agar lebih berpihak

kepada seluruh peserta didik (Arriani dkk, 2022).

1.7. Tantangan dalam Pengembangan Sekolah Inklusif

Pelaksanaan pendidikan inklusif masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satu tantangan yang sering ditemui adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep pendidikan inklusif sehingga masih muncul anggapan bahwa anak berkebutuhan khusus sebaiknya belajar di sekolah khusus. Selain itu, masih banyak sekolah yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana, seperti aksesibilitas bangunan maupun media pembelajaran yang sesuai. Jumlah guru yang memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus juga masih terbatas. Di sisi lain, koordinasi antara sekolah, keluarga, dan pemerintah belum selalu berjalan secara optimal sehingga pelaksanaan program inklusif belum maksimal.

1.8. Upaya Mengatasi Tantangan Pendidikan Inklusif

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Sekolah dapat meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan mengenai strategi pembelajaran inklusif dan penanganan peserta didik berkebutuhan khusus. Pemerintah perlu menyediakan kebijakan yang mendukung, termasuk pengadaan fasilitas belajar yang ramah bagi semua peserta didik. Orang tua dan masyarakat juga perlu diberikan sosialisasi agar memiliki pemahaman yang benar mengenai pendidikan inklusif. Selain itu, kerja sama antara sekolah, keluarga, organisasi masyarakat, dan pemerintah perlu diperkuat sehingga setiap pihak dapat berkontribusi sesuai dengan perannya dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

1.9. Pentingnya Kolaborasi dalam Sekolah Inklusif

Keberhasilan sekolah inklusif sangat bergantung pada kolaborasi yang baik antara seluruh pihak yang terlibat. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan keluarga, masyarakat, organisasi sosial, maupun pemerintah. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, berbagai kebutuhan peserta didik dapat dipenuhi secara lebih optimal. Selain meningkatkan kualitas layanan pendidikan, kerja sama ini juga mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta menghargai perbedaan sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, tujuan pendidikan inklusif untuk memberikan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh peserta didik dapat diwujudkan secara nyata.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep komunitas dalam pendidikan inklusif secara sistematis berdasarkan berbagai sumber ilmiah. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai peran, fungsi, serta bentuk kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Melalui metode deskriptif kualitatif, data yang diperoleh tidak diolah dalam bentuk angka, melainkan diinterpretasikan secara naratif sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (*library research*) dengan mengkaji berbagai referensi yang relevan, seperti artikel jurnal nasional dan internasional, buku ilmiah, prosiding, serta dokumen kebijakan mengenai pendidikan inklusif. Literatur dipilih berdasarkan kesesuaian dengan topik penelitian dan kredibilitas sumber, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui proses identifikasi, pengelompokan, interpretasi, dan sintesis informasi. Hasil kajian dari berbagai sumber tersebut digunakan untuk menyusun pembahasan mengenai komunitas dalam pendidikan inklusif secara objektif dan berdasarkan bukti ilmiah.

Tabel 1. Peran Komunitas dalam Mendukung Pendidikan Inklusif (UNESCO, 2009)

Komunitas	Peran Utama
Sekolah	Menyediakan Pembelajaran yang Inklusif
Orang Tua	Mendampingi dan mendukung belajar anak
Masyarakat	Menciptakan lingkungan yang menerima keberagaman
Organisasi Sosial	Memberikan Pendampingan dan pelatihan
Pemerintah	Menyusun kebijakan dan menyediakan dukungan

Komunitas dalam pendidikan inklusif melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat, organisasi sosial, dan pemerintah yang bekerja sama untuk menjamin kesempatan belajar yang setara bagi semua peserta didik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Hasil kajian menunjukkan bahwa komunitas berperan sebagai mitra sekolah dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusif. Bentuk komunitas yang mendukung pendidikan inklusif antara lain (UNESCO, 2017):

1. komunitas orang tua anak berkebutuhan khusus;
2. kelompok guru dan tenaga kependidikan;
3. organisasi penyandang disabilitas;
4. lembaga swadaya masyarakat (LSM);
5. komunitas relawan pendidikan;
6. forum masyarakat peduli pendidikan inklusif.

Guru dan orang tua memiliki harapan yang tinggi terhadap pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif dapat membantu anak-anak dengan kebutuhan khusus berkembang secara optimal. Tantangan dalam implementasi pendidikan inklusif meliputi kurangnya sumber daya dan pelatihan bagi guru. Perlunya kerja sama antara guru, orang tua, dan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusif (Baroroh & Rukiyati, 2022). Selain komunitas, advokasi menjadi bagian penting dalam menjamin hak pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Melindungi hak peserta didik, menjamin akses pendidikan yang setara, menghilangkan hambatan dan diskriminasi, meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif dan mendorong lahirnya kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif.

3.2. Pembahasan

Keberhasilan sekolah inklusif sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat. Dukungan komunitas dapat meningkatkan penerimaan sosial terhadap peserta didik berkebutuhan khusus serta memperkuat kerja sama antara sekolah dan keluarga. Namun demikian, pelaksanaan pendidikan inklusif masih menghadapi beberapa tantangan, yaitu:

1. kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pendidikan inklusif;
2. adanya stigma terhadap penyandang disabilitas;
3. keterbatasan sarana dan prasarana;

4. kurangnya koordinasi antarpihak;
5. rendahnya partisipasi masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan berbagai upaya, antara lain:

1. sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat;
2. pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan;
3. penguatan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat;
4. penyediaan fasilitas yang memadai;
5. penyusunan kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif.

Kolaborasi yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang ramah, aman, dan menghargai keberagaman sehingga seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang sama.

4. SIMPULAN

Komunitas dan advokasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan sekolah inklusif. Keterlibatan sekolah, keluarga, masyarakat, organisasi sosial, dan pemerintah mampu membangun kerja sama yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang menghargai keberagaman serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta didik. Advokasi juga menjadi upaya strategis dalam melindungi hak peserta didik berkebutuhan khusus melalui pemenuhan akses pendidikan, penyediaan layanan yang sesuai, serta penguatan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Analisis menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan sekolah inklusif tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi komunitas dan efektivitas pelaksanaan advokasi. Berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya kompetensi pendidik, serta lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan masih menjadi hambatan dalam implementasi pendidikan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas pendidik, sosialisasi kepada masyarakat, penyediaan fasilitas yang memadai, serta penguatan kebijakan agar penyelenggaraan sekolah inklusif dapat berjalan secara optimal dan mampu memenuhi hak pendidikan setiap peserta didik tanpa diskriminasi.

REFERENSI

- Ainscow, M. (2005). Developing Inclusive Education Systems. *Journal of Educational Change*, 6(2), 123-140.
- Arriani, F., Agustawati, A., Rizki, A., Widiyanti, R., Wibowo, S., Herawati, F., & Tulalessy, C. (2022). *Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif*. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Baroroh, E., & Rukiyati. (2022). Pandangan guru dan orang tua tentang pendidikan inklusif di taman kanak-kanak. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 3944–3952. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2510>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif*. Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kustawan. (2023). *Pendidikan inklusif dan implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Luxima Metro Media.
- Rahmi, F. N., & Wijayanti, S. (2025). Strategi Advokasi Public Relations dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Inklusif di Wilayah Rural. *Jurnal Audiens*, 6(3), 555-568.

UNESCO. (2009). Policy Guidelines on Inclusion in Education. Paris: UNESCO.

UNESCO. (2017). A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education. Paris: UNESCO.